



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN EVALUASI DAN USULAN PERUBAHAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019**

TANGGAL 17 JUNI 2019

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 17 Juni 2019.
P u k u l	: 16.00 WIB s/d 17.00 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Evaluasi dan Usulan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Hadir Pimpinan	: - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. - M. Sarmuji, SE. - H. Totok Daryanto, SE - Drs. Sudiro Asno, AK.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya. - Panitia Perancang UU DPD RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka pembahasan evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang

UU DPD RI untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan evaluasi dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.

II. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019, menyetujui untuk menyepakati:

- I. DPR, Pemerintah, dan DPD berkomitmen untuk melakukan penyelesaian pembahasan RUU yang menjadi inisiatif masing-masing pihak sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan perintah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikhususkan 31 (tiga puluh satu) RUU yang sedang dalam tahap Pembicaraan Tk. I, sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan .
- II. Terhadap 3 (tiga) RUU yang diusulkan oleh DPR (RUU tentang Keamanan Laut diusulkan Komisi I DPR, RUU tentang Perlindungan Konsumen diusulkan Komisi VI DPR, dan RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan diusulkan Komisi IX DPR), Pengusul diminta untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- III. Menarik RUU tentang Permusikan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ditutup pukul 17.00 WIB

Jakarta, 17 Juni 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001